

**KOORDINASI PENGAWASAN PELINTAS BATAS ANTAR NEGARA PADA POS LINTAS BATAS  
NEGARA MOTAAIN (REPUBLIK INDONESIA-REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE)  
DI KABUPATEN BELU**

**Amin Aminggas Makleat<sup>1\*</sup>, Stefanus Bekun<sup>2</sup>, Herminus Kefi<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Timor, Kefamenanu, Indonesia

Email: [minggasmakleat@gmail.com](mailto:minggasmakleat@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [stefanusbekun@gmail.com](mailto:stefanusbekun@gmail.com)<sup>2</sup>, [herminus13@gmail.com](mailto:herminus13@gmail.com)<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Amin Aminggas Makleat, NPM 22210152, Judul Skripsi Koordinasi Pengawasan Pelintas Batas Antar Negara Pada Pos Lintas Batas Negara (Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste) Di Kabupaten Belu. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah koordinasi pengawasan pelintas batas antar negara pada PLBN motaain (RI-RDTL) di Kabupaten Belu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi pengawasan pelintas batas antar negara pada PLBN motaain (RI-RDTL) di Kabupaten Belu. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yaitu informan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi pengawasan yang dilakukan di PLBN Motaain dengan fokus penelitian 1) Komunikasi dalam pengawasan sudah cukup efektif yang mana adanya komunikasi formal dan informal, 2) Kesadaran pentingnya koordinasi di PLBN Motaain cukup baik karena masing-masing petugas dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, dan Polri mempunyai kesadaran mengenai tugas pokok dan fungsinya, 3) Kompetensi partisipan menunjukkan tingkat kompetensi yang relatif baik, hal ini ditunjukkan melalui petugas yang kompeten dalam hal ini mengawasi di PLBN Motaain, 4) Kesepakatan, komitmen, insentif koordinasi cukup baik dilihat dari kekonsistenan para pegawai dalam proses pengawasan pelintas batas di PLBN kemudian adanya bentuk penghargaan seperti penyediaan fasilitas, bahan makanan, dan juga anggaran kepada para pegawai, dan 5) Kontinuitas perencanaan belum optimal dalam hal ini seperti belum adanya dokumen rencana bersama seperti rencana aksi dan rencana kontinjensi. Dari hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan kepada instansi-instansi di PLBN Motaain untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya melintas secara ilegal dan mulai membuat dokumen rencana kerja untuk bisa dilakukan evaluasi dalam hal ini mengenai koordinasi pengawasan di pos lintas batas negara motaain.

**Article History**

Received: September 2025

Reviewed: September 2025

Published: September 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

**Kata Kunci:** Koordinasi, Pengawasan, Pelintas Batas.

#### **ABSTRACT**

*Amin Aminggas Makleat, NPM 22210152, Thesis Title of Coordination of Supervision of Border Crossings between Countries at Cross-Border Posts (Republic of Indonesia-Democratic Republic of Timor Leste) in Belu Regency. The problem in this study is how to coordinate the supervision of cross-border crossings between countries at PLBN Motaain (RI-RDTL) in Belu Regency. This study aims to find out and analyze the coordination of border crossing supervision between countries at PLBN Motaain (RI-RDTL) in Belu Regency. The type of research used is qualitative descriptive. Data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. The data sources are informants and documents. The results of the study show that the supervision coordination carried out at PLBN Motaain with the focus of research 1) Communication in supervision is quite effective where there is formal and informal communication, 2) Awareness of the importance of coordination at PLBN Motaain is quite good because each officer from Customs, Immigration, Quarantine, TNI, and Polri has awareness of their main duties and functions, 3) The competence of participants shows a relatively good level of competence, this is shown through competent officers in this case supervising at PLBN Motaain, 4) Agreements, commitments, and coordination incentives are quite good seen from the consistency of employees in the process of supervising border crossers at PLBN then there are forms of rewards such as the provision of facilities, foodstuffs, and also budgets to employees, and 5) Continuity of planning is not optimal in this case such as the absence of joint plan documents such as action plans and plans Contingency. From the results of the study, the researcher suggested to agencies in PLBN Motaain to provide socialization about the dangers of crossing illegally and start making work plan documents to be able to be evaluated in this case regarding the coordination of supervision at the Motaain cross-border post.*

**Keywords:** Coordination, Supervision, Border Crossing.

#### **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara pantai yang komponen wilayahnya terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara. Secara geografis wilayah Indonesia

memiliki perbatasan darat dan laut dengan Timor Leste, Papua Nugini, Malaysia, Australia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, dan India. “Perbatasan ini mencerminkan kedaulatan, Indonesia dan sangat penting dalam menjaga keamanan, integritas wilayah, serta pengelolaan sumber daya didalamnya (Hidayat, 2015:306)”.

Perbatasan RI terbagi atas dua sektor, yaitu (1) Sektor Timur (sektor utama/*main sector*) di Kabupaten Belu yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro di Timor Leste sepanjang 149.1 kilometer dan (2) Sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi yang merupakan wilayah *enclave* Timor Leste sepanjang 119.7 kilometer (Fauzan, 2011:9).

Kabupaten Belu merupakan suatu kawasan yang menjadi sorotan mata bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Negara Indonesia. Desa Silawan merupakan salah satu desa yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, tepatnya dengan wilayah Batugede, Kecamatan Balibo, Kabupaten Bobonaro/Maliana. Motaain adalah wilayah administratif yang terletak di Desa Silawan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Karena berada di perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, wilayah ini menjadi salah satu pos lintas batas penting antar kedua negara.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, merupakan area yang mempunyai fungsi sebagai pintu keluar dan masuknya pelintas batas antar wilayah negara yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung untuk memberikan pelayanan terpadu kepada pelintas batas yang akan masuk dan juga keluar. Di PLBN Motaain juga terdapat beberapa unit pengawasan yang beroperasi didalamnya seperti, Bea Cukai (*Customs*), Imigrasi (*Immigration*), Karantina (*Quarantine*), dan Keamanan (*Security*) atau disingkat (CIQS) sebagai pelaksana fungsi pemerintah dipintu masuk negara untuk menjaga keamanan bangsa dan negara dalam bidang kesehatan, keimigrasian, dan kepabeanan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No 18 Tahun 2007 tentang Standarisasi sarana prasarana dan pelayanan pelintas batas antar negara.

Perbatasan negara memiliki karakteristik unik dan sering kali menjadi titik rawan bagi berbagai aktivitas ilegal. Di kawasan antara perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), fenomena penyelundupan menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang komprehensif. Adapun aktivitas ilegal di PLBN Motaain seperti penyeludupan barang, perlintasan ilegal, dan lain sebagainya. Praktik ini seringkali dilakukan oleh jaringan terorganisir yang memanfaatkan celah dalam pengawasan. Wilayah dengan kondisi geografis yang beragam dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan di perbatasan.

Secara formal pengawasan yang dilakukan melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain yang berfungsi sebagai titik utama pemeriksaan bagi individu atau perlintasan orang, hewan/ikan/tumbuhan maupun barang yang melintasi perbatasan. Berikut penulis memasukkan data terkait sarana dan prasarana pengawasan milik bea cukai di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain:

**Tabel 1. Sarana dan Prasarana Pengawasan Milik Bea Cukai di PLBN Motaain**

| No | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|----|----------------------|--------|
|----|----------------------|--------|

|       |                            |        |
|-------|----------------------------|--------|
| 1     | CCTV                       | 9 Set  |
| 2     | X-Ray Pelintas             | 2 Unit |
| 3     | X-Ray Barang               | 2 Unit |
| 4     | Senjata Api                | 9 Unit |
| 5     | Taser Gun                  | 2 Unit |
| 6     | Baton                      | 2 Set  |
| 7     | Body Armour                | 2 Set  |
| 8     | Narcotest                  | 2 Pack |
| 9     | HT/Radio<br>Telekomunikasi | 13     |
| 10    | Kendaraan<br>Operasional   | 2 Unit |
| Total |                            | 45     |

Sumber: Kantor Bea Cukai Atambua, 2025

Berdasarkan data tabel 1. dapat dilihat bahwa di pos lintas batas negara (PLBN) motaaain telah dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pengawasan seperti CCTV (*Closed-Circuit Television*), X-Ray, senjata api, hingga kendaraan operasional. Meskipun jumlah total peralatan tercatat sebanyak 45 unit, namun jumlah masing-masing jenis sarana masih tergolong terbatas jika dibandingkan dengan intensitas aktivitas lintas batas yang cukup tinggi. Misalnya, hanya terdapat 2 unit X-ray untuk pelintas dan 2 unit X-ray untuk barang yang kemungkinan besar tidak mampu memfasilitasi pemeriksaan menyeluruh ketika terjadi lonjakan pelintas atau arus barang.

Salah satu aktivitas penyelundupan yang terjadi di PLBN yaitu penyelundupan pupuk subsidi pada tahun 2023 yang berhasil melewati PLBN Motaain yang kemudian diamankan di Timor Leste hal tersebut menurut sumber yang ada dikarenakan bahwa Bea Cukai hanya sebatas memeriksa administrasi tanpa memeriksa barang yang dikirim. Dari kasus tersebut, artinya bahwa koordinasi harus ditingkatkan terutama dalam hal ini pemeriksaan barang bawaan oleh pelintas, dokumen-dokumen yang dibawa, diperiksa secara teliti dan menyeluruh agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan.

Mc. Farland (dalam Ramadani, 2017:151) mengemukakan bahwa koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam berkoordinasi antar instansi (CIQS) agar bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam PLBN Motaain.

Atas dasar latar belakang ini, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Koordinasi Pengawasan Pelintas Batas Antar Negara Pada Pos Lintas Batas Negara Motaain (Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste) Di Kabupaten Belu”.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Meminjam istilah (Moleong, 1997) dalam (Upe dan Damzid, 2010) penelitian kualitatif bertolak paradigma alamiah ini mengasumsikan bahwa realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu sama lain.

### Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan inti dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah (Moleong, 2014:137). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah menggunakan teori Koordinasi menurut Handyaningrat (1989:80) : (1) Komunikasi, (2) Kesadaran Pentingnya koordinasi, (3) Kompetensi Partisipan, (4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi, (5) Kontinuitas Perencanaan.

## Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Informan, informan adalah orang yang benar-benar tahu terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah: petugas Bea Cukai, Petugas Imigrasi, Petugas Karantina, Anggota TNI, dan Anggota Polri.
- 2) Dokumen, penelitian arsip/dokumen (*archival study*) adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan catatan data yang disimpan dalam bentuk fisik maupun digital. Catatan tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan mengenai perilaku, sikap, keyakinan, dan lain-lain (Schweigert, 2021).

## Teknik Pengumpulan Data

- 1) Observasi

Nasution (2013:310) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

- 2) Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2011:316) mendefinisikan wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

- 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, biografi, peraturan kebijakan. Sedangkan, dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain.

## HASIL PEMBAHASAN

### Gambaran Umum PLBN Motaain

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, yang terletak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu yang dibangun untuk memperkuat perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste.

Pembangunan PLBN ini dimulai pada tahun 2015 dan diresmikan pada tanggal 28 Desember 2016 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi Dodo dengan luas kawasan 8,5 hektar.

PLBN Motaain bukan hanya berfungsi sebagai pintu gerbang perbatasan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi strategis dan sebagai simbol hubungan yang baik antara Indonesia dan Timor Leste. Didalam PLBN juga terdapat beberapa instansi yang beroperasi didalamnya seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, Polri, dan Sekuriti (CIQS). Ada pun jarak PLBN Motaain ke:

- 1) Atambua (Ibu Kota Kabupaten Belu:  $\pm 17$  Km)
- 2) Kupang (Ibu Kota Provinsi NTT  $\pm 296$  Km)

3) Dili (Ibu Kota Negara Timor Leste ±114 Km).

### Pembahasan

Berikut peneliti mengemukakan data yang merupakan hasil penelitian di lokasi penelitian tepatnya di Pos Lintas Batas Negara Motaain dengan khususnya mengenai koordinasi pengawasan pelintas batas antar negara pada pos lintas batas negara Motaain (Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste) di Kabupaten Belu.

#### 1) Komunikasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator komunikasi, peneliti menemukan bahwa proses penyampaian atau pertukaran informasi yang dilakukan oleh instansi-instansi yang beroperasi di PLBN Motaain (CIQS) sudah cukup efektif, meskipun ada kalanya terhambat karena jaringan dan juga kesibukan. Proses penyampaian informasi terdiri dari komunikasi formal dan informal yang dilakukan antar instansi. Komunikasi formal meliputi surat resmi dan rapat koordinasi misalnya seperti rapat mengenai koordinasi di PLBN yang dihadiri oleh Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, dan Polri. Sedangkan bentuk penyampaian informasi secara informal melalui grup whatsapp.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, diketahui bahwa memang dalam proses komunikasi antar instansi itu ada didalam lingkup PLBN, seperti dalam komunikasi formal setiap ada kegiatan pengawasan terpadu atau operasi gabungan di wilayah perbatasan selalu diawali dengan surat tugas dan surat undangan resmi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang. Ada juga dimana pada saat pelintas melewati PLBN adanya koordinasi khususnya komunikasi yang dijalankan seperti contoh yang saya lihat seorang pelintas membawa barang dan hendak melintas maka adanya proses penyampaian informasi antara Bea Cukai dengan Imigrasi entah terkait dengan barang bawaan ataupun orang tersebut. Selain itu ada juga bentuk informasi yang dikeluarkan oleh PLBN Motaain kepada publik mengenai jumlah perlintasan setiap bulannya, prosedur melintas, bahkan penjelasan mengenai jenis serta fungsi PLBN melalui media sosial (instagram, facebook). Hal ini sejalan dengan teori koordinasi menurut Handyaningrat (1989:80), komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide dan gagasan, dari satu pihak ke pihak lainnya. Biasanya aktivitas komunikasi ini dilakukan secara verbal atau lisan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Komunikasi dapat dilihat dari ada tidaknya informasi, ada tidaknya alur informasi, dan ada tidaknya teknologi informasi. Dalam praktiknya sudah sesuai, baik dari proses pertukaran informasi secara formal maupun informal, alur informasi antar petugas di PLBN, serta teknologi yang digunakan seperti media sosial berupa whatsapp.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan antar instansi dalam berkoordinasi sudah cukup baik, meskipun ada beberapa kendala tapi tidak sampai terjadi miskomunikasi yang terlalu fatal.

**Tabel 2. Rekapitulasi Perlintasan TPI Motaain Tahun 2024**

| No | Bulan    | Kedatangan | Keberangkatan | Total         |
|----|----------|------------|---------------|---------------|
| 1  | Januari  | 10.662     | 12.557        | <b>23.219</b> |
| 2  | Februari | 9.571      | 9.290         | <b>18.861</b> |
| 3  | Maret    | 11.330     | 10.844        | <b>22.174</b> |
| 4  | April    | 12.445     | 12.435        | <b>24.880</b> |
| 5  | Mei      | 12.902     | 13.291        | <b>26.193</b> |

|    |           |        |        |               |
|----|-----------|--------|--------|---------------|
| 6  | Juni      | 13.985 | 14.101 | <b>28.086</b> |
| 7  | Juli      | 15.816 | 15.414 | <b>31.230</b> |
| 8  | Agustus   | 16.251 | 15.868 | <b>32.119</b> |
| 9  | September | 12.537 | 13.007 | <b>25.544</b> |
| 10 | Oktober   | 15.567 | 15.474 | <b>31.041</b> |
| 11 | November  | 16.985 | 16.086 | <b>33.071</b> |
| 12 | Desember  | 20.670 | 19.286 | <b>39.956</b> |

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, 2025

Berdasarkan data tabel 2. mengenai rekapitulasi perlintasan TPI di Motaain tahun 2024, peneliti memasukkan data tersebut dibagian indikator komunikasi sebagai data pendukung dikarenakan data tersebut bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan, sehingga diperlukan komunikasi yang lancar, terbuka, dan terstruktur antar instansi. Sebagai contoh, jika Imigrasi memiliki data WNA, tetapi tidak dikomunikasikan dengan Bea Cukai atau Karantina maka dapat berpotensi terhadap (penyakit, barang terlarang, ataupun bahkan pelintas ilegal.

## 2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kesadaran pentingnya koordinasi, dapat dilihat bahwa di PLBN Motaain masing-masing instansi ataupun petugas sudah menunjukkan kesadaran pentingnya koordinasi dalam pengawasan di wilayah kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disandang. Dalam melakukan pengawasan kesadaran pentingnya koordinasi dalam menyampaikan secara terus-menerus mengenai koordinasi, memberikan pengarahan dan menghimbau untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi di PLBN Motaain.



**Gambar 1. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan (Paspor) Imigrasi Motaain**

Sumber Data: Dokumentasi Penelitian, 2025

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, diketahui bahwa di kawasan PLBN Motaain ada kesadaran mengenai penting koordinasi di dalam pengawasan hal ini dapat dilihat dari pengamatan penulis, di PLBN Motaain sendiri masing-masing instansi di lingkup kerjanya menjalankan tugasnya dengan pemahaman tentang ketergantungan tugas seperti menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan sendiri, seperti contoh dari Imigrasi membutuhkan data dari Bea Cukai dan Karantina sebelum mengizinkan pelintas membawa barang atau hewan tertentu. Dalam teori koordinasi menurut Handyaningrat (1991:80), Kesadaran pentingnya koordinasi merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh setiap organisasi, karena tingkat pengetahuan dan ketaatan pelaksana terhadap koordinasi sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya kerja sama antar instansi, sebab tanpa dukungan kesadaran ini sinergitas tidak akan berjalan efektif. Artinya bahwa kesadaran dalam berkoordinasi itu sangat penting dan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kekacauan,

percekcokan, atau kekosongan pekerjaan sehingga proses koordinasi pengawasan di PLBN Motaain bisa berjalan dengan efektif.



**Gambar 2. Pemeriksaan Kendaraan oleh Badan Karantina PLBN Motaain**

Sumber Data: Dokumentasi Penelitian, 2025

Dapat disimpulkan bahwa instansi-instansi seperti *Customs, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sudah menunjukkan kesadaran pentingnya koordinasi yang mana melibatkan satu instansi dengan instansi lain di kawasan PLBN. Misalnya seperti Imigrasi dan Bea Cukai, apabila ada WNA yang masuk ke Indonesia, disitu adanya pemeriksaan kalau dia WNA berarti ke bagian Imigrasi untuk didata, kemudian ada barang bawaan apa saja yang dibawa akan dilakukan pemeriksaan oleh Bea Cukai. Jadi terdapat kesadaran pentingnya koordinasi antar instansi di kawasan PLBN mulai dari pemeriksaan dokumen perjalanan hingga pemeriksaan keluar-masuknya kendaraan di PLBN Motaain .

### 3) Kompetensi Partisipan

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kompetensi partisipan, dapat dilihat bahwa beberapa instansi seperti imigrasi dan bea cukai menunjukkan tingkat kompetensi yang relatif baik. Yang mana kompetensi disini bukan hanya mencakup kemampuan teknis dan pemahaman tugas, tetapi juga keterampilan komunikasi dan kerja sama tim. Hal ini dilihat dari data yang telah disajikan sebelumnya bahwa ada bimbingan teknis terkait pelatihan pemeriksaan dokumen maupun cara mengenali perilaku penumpang yang diselenggarakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Imigrasi dan diikuti oleh masing-masing anggota dari kantor Imigrasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, peneliti menemukan bahwa keterlibatan para petugas antar instansi di PLBN Motaain sudah ada dan partisipasi untuk berkoordinasi di PLBN juga cukup aktif dikarenakan semua ada tugas dan fungsi serta perannya masing-masing. Seperti contoh pada saat melintas melalui PLBN disitu ada pemeriksaan barang dan juga paspor oleh petugas, kemudian ada juga pemeriksaan fisik dimana petugas menggunakan X-ray barang dan juga X-ray pelintas untuk mendeteksi apabila ada kemungkinan disembunyikan barang-barang terlarang. Dalam teori Handyaningrat (1989:80), kompetensi partisipan dalam berkoordinasi dapat dilihat dari ada tidaknya pejabat berwenang yang mengambil bagian. Kompetensi adalah kewenangan atau kecakapan atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan jabatan yang disandanginya, sedangkan partisipan orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Dilihat dari praktiknya kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya sudah baik, para petugas juga mempunyai peran masing-masing dalam membidangi tugasnya sehingga bisa berjalan secara efektif.

Dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang berkaitan dengan kompetensi partisipan dari masing-masing instansi cukup baik, dikarenakan masing-masing partisipan turut mengambil bagian dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing serta kemampuan dari para petugas dalam mengoperasikan alat-alat seperti pada saat pemeriksaan barang ataupun paspor dari pelintas.

#### 4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi dapat dilihat bahwa, bentuk kesepakatan yang digunakan dalam berkoordinasi di PLBN Motaain yang mencakup (*customs, immigration, Quarantine, Security*) adalah bentuk kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) akan tetapi kesepakatan tersebut dilakukan di tingkat pusat atau pada level nasional bukan ditingkat daerah. Dalam hal komitmen, sudah baik hal ini dapat dilihat pada penyajian data dimana para petugas antar instansi mengadakan event besar seperti contoh kunjungan Paus Fransiskus ke Dili, itu adalah salah satu kegiatan besar sehingga perlu sinergi agar tidak terjadi penumpukan sehingga kerja sama terjalin bagus dikarenakan adanya komitmen dari masing-masing instansi di dalam PLBN Motaain. Sedangkan untuk insentif koordinasi juga dikatakan baik karena berkaitan dengan bentuk penghargaan atau motivasi berupa anggaran, fasilitas yang mendorong partisipasi aktif dalam berkoordinasi. Misalnya, seperti kantor imigrasi, itu disediakan fasilitas yang baik untuk teman-teman yang bekerja di PLBN terkhususnya di imigrasi motaain seperti menyediakan bahan makanan, sehingga para petugas yang bekerja di imigrasi motaain tidak perlu membelinya lagi, itu adalah salah satu bentuk insentif koordinasi. Meskipun tidak ada penghargaan tetapi menyediakan fasilitas juga termasuk dalam bentuk memotivasi dan mensejahterakan para petugas.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, peneliti menemukan bahwa komitmen dari petugas yang bekerja di PLBN Motaain itu ada mulai dari kehadiran dalam rapat, kesiapsiagaan bersama seperti TNI dan Polri saat ada hari raya besar mereka selalu siaga untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Penulis mengamati juga bahwa di dalam PLBN terdapat fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti mes dilengkapi dengan perabotan untuk petugas yang bekerja di PLBN Motaain. Kesepakatan bukan hanya tentang perjanjian kerja sama akan tetapi peraturan-peraturan, prosedur-prosedur, dan kebijakan-kebijakan adalah bagian dari bentuk kesepakatan Guamanti (2012:668). Adapun O'Reilly (1989:11) menyebutkan komitmen karyawan pada organisasi sebagai ikatan kejiwaan individu terhadap organisasi yang mencakup keterlibatan kerja, kesetiaan, dan rasa percaya terhadap nilai-nilai organisasi. Dalam praktiknya keterlibatan kerja ada, dimana para petugas mempunyai partisipasi yang cukup aktif dalam melakukan pekerjaannya sesuai tugas dan peraturan dari instansinya.

Adapun koordinasi adalah usaha penyesuaian dari bagian-bagian yang berbeda agar aktivitas dari setiap bagian tersebut dapat diselesaikan tepat waktunya sehingga masing-masing anggota dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan Handyaningrat, 1989 (dalam Desi Kurniasari, 2022:24).

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi di kawasan PLBN Motaain sudah baik hal ini dapat dilihat dari bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh tingkat nasional, komitmen dari para petugas mengenai tugas dan tanggungjawabnya dalam berkoordinasi, serta insentif atau bentuk penghargaan baik itu dari anggaran maupun fasilitas yang disediakan sebagai salah satu cara memotivasi para petugas dalam bekerja terutama dalam koordinasi pengawasan di pos lintas batas negara motaain.



**Gambar 3. Kesepakatan antar instansi mengenai pemusnahan media pembawa karantina di PLBN Motaain**  
Sumber: Arsip Karantina PLBN Motaain

#### 5) Kontinuitas Perencanaan

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kontinuitas perencanaan, dapat dilihat bahwa dalam koordinasi merujuk pada sejauh mana program atau rencana kerja yang telah disusun bersama dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Namun dalam praktiknya pengawasan pelintas batas antar negara pada PLBN Motaain ditemukan bahwa terdapat sejumlah program yang sebenarnya telah dirancang namun tidak terealisasi secara optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, sejumlah sarana penunjang yang telah direncanakan belum terimplementasi. Selain itu belum adanya dokumen rencana bersama seperti rencana aksi, rencana kontijensi, ataupun kalender kegiatan. Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi, 2011:28) perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan rencana tersebut tidak berjalan yaitu perubahan kebijakan internal masing-masing instansi, target yang terlalu besar sehingga perlu dikecilkan, dan ada rotasi pegawai yang membuat informasi rencana tidak dilanjutkan oleh pejabat baru. Hal ini menunjukkan bahwa kontinuitas perencanaan belum terwujud secara optimal.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontinuitas perencanaan belum berjalan secara optimal, meskipun telah disusun banyak program namun ada beberapa yang tidak terealisasi dengan baik karena ada berbagai kendala internal seperti target yang terlalu besar, serta rotasi pegawai yang menghambat keberlanjutan informasi dan tindak lanjut.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Koordinasi Pengawasan Pelintas Batas Antar Negara Pada Pos Lintas Batas Negara Mottaain (Republik Indonesia-Republik Demokratik Timoer Leste) Di Kabupaten Belu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1) Komunikasi

Komunikasi memegang peranan strategis dalam efektivitas koordinasi antar instansi di PLBN Motaain. Proses pengawasan pelintas batas telah dibantu oleh komunikasi yang berlangsung, baik melalui jalur informal melalui media sosial maupun mekanisme formal seperti rapat

langsung. Meskipun ada kendala teknis seperti keterbatasan kehadiran fisik dalam rapat dan gangguan jaringan saat pemadaman listrik.

2) Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Menunjukkan bahwa setiap instansi di bawah koordinasi *Customs, Immigration, Quarantine*, dan *Security* (CIQS) memiliki kesadaran yang tinggi terhadap peran koordinasi. Peran ini ditunjukkan melalui instruksi, nasihat, dan penegasan tugas pokok.

3) Kompetensi Partisipan

Kompetensi partisipan para petugas yang ada di PLBN Motaain sudah baik. Setiap instansi terkait memiliki anggota yang berwenang dan berkompeten untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan otoritas mereka. Keterlibatan petugas dalam program peningkatan kapasitas, seperti bimbingan teknis.

4) Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi

Kesepakatan antar instansi telah diformalkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditingkat nasional yang menjadi landasan koordinasi di wilayah perbatasan. Komitmen dapat dilihat dari keterlibatan petugas seperti mengatur arus lalu lintas sedangkan insentif koordinasi seperti fasilitas dan dana, dapat mendorong petugas untuk berpartisipasi lebih aktif.

5) Kontinuitas Perencanaan

Meskipun telah banyak program dan rencana yang telah dibuat, belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini ditunjukkan oleh tidak adanya sarana penunjang yang direncanakan, tidak adanya dokumen rencana bersama, seperti rencana aksi, rencana kontinjensi, serta keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh faktor internal masing-masing instansi.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Stefanus Bekun, S.Sos., M.AP dan Bapak Herminus Kefi, S.Sos.M., Si selaku dosen pembimbing dan Bapak Dr. Salesius V. Kolne, S.Sos., M.AP selaku dosen penguji atas bimbingan, masukan, dan arahan yang sangat berarti dalam proses penelitian ini.

Penulis juga mengapresiasi bantuan dari Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, TNI, dan Polri yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan baik itu melalui wawancara maupun dokumentasi, serta kepada keluarga dan teman-teman yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan selama penelitian ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admizal, A., & Fitri, E. (2018). Pendidikan Nilai Kepedulian Sosial Pada Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar. *Jurnal Gentala Pendidikan Dasar*, 3(1), 163-180. <https://doi.org/10.22437/gentala.v3i1.6778>
- Isra Andini, I., & Ridwan, M. (2022). Koordinasi Perencanaan Sektoral Dan Regional Dalam Perencanaan Infrastruktur Pariwisata Di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Bukit Lawang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. In *Jurnal Professional* (Vol. 9, Issue 2).
- Pemerintahan, J., & Politik, D. (2023). *Kolaborasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengurangi Penyelundupan di Daerah Perbatasan (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)*. 8(4), 305-313.

- Ramdhany, I., Djumiarti, T., Publik, J. A., Professor, J., Soedarto, H., Hukum, S., Semarang, T., & Pos, K. (n.d.). *Faktor-Faktor dalam Koordinasi Lintas Sektoral Pengelolaan Drainase di Kota Semarang*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods)*. Alfabeta.
- Sumolang, S. G., Saerang, I. S., Maramis, J. B., Stefani, O. :, Sumolang, G., Saerang, I., Maramis, J. B., Manajemen, J., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). *EFEKTIVITAS PERENCANAAN DANA DESA DI DESA SEA KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND PLANNING IN SEA VILLAGE PINELENG DISTRICT MINAHASA REGENCY*. 9, 973-982.
- UPAYA INDONESIA DALAM MENANGANI MASALAH*. (n.d.).
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang standarisasi sarana prasarana dan pelayanan lintas batas antar negara*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.